

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah berkembang sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Perkembangan tersebut difokuskan kepada reformasi birokrasi di daerah yang efisien, optimal dan efektif. Muara dari hal tersebut adalah tingkat pelayanan pemerintah daerah yang maksimal kepada masyarakatnya (Arief, 2007).

Orientasi pembangunan sektor publik adalah untuk menciptakan *good governance*. *Good governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik atau sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran dari salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002).

Terdapat tiga mekanisme yang dapat dilaksanakan daerah agar lebih responsif, transparan dan akuntabel serta selanjutnya dapat mewujudkan *good governance* yaitu : (1) mendengarkan suara atau aspirasi masyarakat serta membangun kerjasama pemberdayaan masyarakat, (2) memperbaiki *internal rules* dan mekanisme pengendalian, dan (3) membangun iklim kompetisi dalam memberikan layanan terhadap masyarakat serta marketisasi layanan. Ketiga

mekanisme tersebut saling berkaitan dan saling menunjang untuk memperbaiki efektivitas pengelolaan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2006).

Fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik di Indonesia dewasa ini adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Dimensi akuntabilitas publik meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas manajerial, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan, dan akuntabilitas finansial (keuangan). Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingannya (*stakeholder*). *Governmental Accounting Standards Board* (1999) dalam *Concepts Statement No. 1 tentang Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya.

Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Oleh karena itu, informasi tersebut harus bermanfaat bagi para pemakai. Mengatakan bahwa informasi harus

bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Pihak – pihak pengguna laporan keuangan pemerintah antara lain : masyarakat, para wakil rakyat, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, pinjaman dan pemerintah sendiri (Warsito dkk, 2008).

Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut berpaut dengan keputusan yang menjadi sasaran informasi. Informasi akan bermanfaat kalau informasi tersebut dipahami dan digunakan oleh pemakai. Informasi juga akan bermanfaat kalau pemakai mempercayai informasi tersebut.

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Harus disadari bahwa ada banyak pihak yang akan mengandalkan informasi dalam laporan keuangan yang dipublikasikan oleh pemerintah daerah sebagai dasar untuk pengambilan keputusan. Mengingat bahwa keterandalan dan ketepatanwaktuan merupakan dua unsur nilai informasi yang penting terkait dengan pengambilan keputusan berbagai pihak, peneliti tertarik untuk meneliti hal apa yang mungkin mempengaruhi keterandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah.

Faktor pertama yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi. Permasalahan penerapan basis akuntansi bukan sekedar masalah teknis akuntansi, yaitu bagaimana mencatat transaksi dan menyajikan laporan keuangan, namun yang lebih penting adalah bagaimana menentukan kebijakan akuntansi (*accounting policy*), perlakuan akuntansi untuk suatu transaksi (*accounting treatment*), pilihan akuntansi (*accounting choice*), dan mendesain atau menganalisis sistem akuntansi yang ada. Kebijakan untuk melakukan aktivitas tersebut tidak dapat dilakukan oleh orang (pegawai) yang tidak memiliki pengetahuan di bidang akuntansi (Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006). Sehingga untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka kapasitas sumber daya manusia yang melaksanakan sistem akuntansi sangatlah penting.

Faktor kedua yang mempengaruhi keterandalan dan ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan informasi akuntansi manajemen. Semakin kompleksnya dunia usaha dewasa ini kian membuat disiplin Akuntansi Manajemen menjadi suatu kebutuhan penting bagi para manajer di dalam perusahaan. Setiap organisasi harus berusaha memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber dayanya melalui cara yang paling optimal. Para manajer membutuhkan informasi akuntansi manajemen terandalan untuk mengantisipasi masa depan dan memantau roda usaha perusahaan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern akuntansi. Sistem akuntansi sebagai sistem

informasi merupakan subjek terjadinya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Oleh karena itu sistem akuntansi memerlukan pengendalian intern atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Berdasar uraian di atas, maka penelitian ini akan meneliti hubungan antara kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan informasi akuntansi manajemen, dan pengendalian intern akuntansi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan mengambil judul ” **PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PEMANFAATAN INFORMASI AKUNTANSI MANAJEMEN, DAN PENGENDALIAN INTERN AKUNTANSI TERHADAP NILAI INFORMASI PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus pada Inspektorat dan Bappeda Kota Pangkalpinang)**”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan informasi akuntansi manajemen berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengendalian intern akuntansi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah?

### **1.3 Batasan Masalah**

Batasan masalah ini bertujuan untuk memberikan ruang lingkup agar masalah tidak terlalu luas, sehingga pembahasan terarah dan terfokus pada pelaporan keuangan pemerintah daerah di Pangkalpinang berdasarkan pada pengujian teori keagenan dan kepatuhan pada inspektorat dan bappeda kota Pangkalpinang.

Untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pembahasan, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan sebagai berikut : pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi keuangan yang mencakup keterandalan dan ketepatanwaktuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemanfaatan informasi akuntansi manajemen terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Memberikan bukti empiris tentang pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

## 1.5 Manfaat Penelitian

### 1. Pemerintah daerah

Penelitian ini diharapkan dapat sebagai dasar atau acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan pengelolaan keuangan daerah khususnya bagian akuntansi agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi dengan baik yang akhirnya bermuara pada dihasilkannya laporan keuangan pemerintah daerah yang andal dan tepat waktu.

### 2. Pemakai laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian dapat membantu khususnya bagi investor, kreditur, dan donatur, dalam hal pertimbangan mengambil keputusan melakukan kerjasama di bidang keuangan atau tidak dengan suatu pemerintahan daerah.

### 3. Publik

Dengan penelitian ini, masyarakat dapat melihat sejauh mana transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di inspektorat dan bappeda kota Pangkalpinang, serta dapat mengawasi jalannya pemerintahan agar terciptanya *good governance*.

### 4. Bagi Institusi pendidikan, dapat menjadi referensi bagi calon peneliti selanjutnya yang berminat melakukan penelitian menyangkut masalah yang dibahas

## 1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian tentang pelaporan keuangan pemerintah daerah di inspektorat dan bappeda kota

Pangkalpinang : pengujian teori keagenan dan kepatuhan ini akan dibagi ke dalam lima bab yaitu:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan dan batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan dasar teori dan analisis, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis dan kerangka pemikiran.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi metode penelitian yang meliputi rancangan penelitian, variabel dan pengukurannya, populasi dan sampel, metoda pengumpulan data, dan metoda analisis data.

### **BAB IV PEMBAHASAN**

Bab ini berisi pembahasan permasalahan yang diteliti dan menganalisis variabel-variabel penelitian yang berhubungan sesuai dengan metode dan teknik analisis yang dipilih dalam rangka pencapaian tujuan penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari bab-bab terdahulu, kesimpulan analisis data, keterbatasan penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.